BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703
P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id

Nomor : KP.02.04/027/KRU/VII/2021 Jakarta, 12 Juli 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Sosialisasi Penyusunan Dupak dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

Yth. Bapak/Ibu
(Daftar terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka tindak lanjut pembinaan karier bagi pegawai yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang melalui mekanisme penyesuaian *(inpassing),* kami mengundang Bapak/Ibu Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang dalam kegiatan Sosialisasi bertema Penyusunan Dupak dan Penilaian Angka Kredit.

Melalui kegiatan ini, para peserta akan diberikan pemaparan dan diharapkan mendapatkan pemahaman dalam penyusunan DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) yang sesuai dengan serangkaian aturan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang Juklak dan Juknis yang telah dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.

Bersama ini dimohon Bapak/Ibu dapat menugaskan dari setiap satuan kerja, Pegawai Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang untuk hadir dalam rapat yang diselenggarakan secara daring / *online* pada :

Hari / Tanggal	: Rabu / 21 Juli 2021
Waktu	: Pukul 09.30 WIB s.d selesai
Meeting ID	: 955 7254 4423
Passcode	: 845120
Pimpinan Rapat	: Kepala Biro Umum dan SDM

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan kehadiranya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,

Petrus Demon Sili

Tembusan :
Sekretaris Utama

Lampiran Surat Kepala Biro Umum dan SDM
Nomor : KP.02.04/027/KRU/VII/2021
Tanggal : 12 Juli 2021

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

1. Inspektur
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
4. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
5. Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wil. I s.d V
6. Kepala Bagian Pengadaan dan Barang Milik Negara
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis